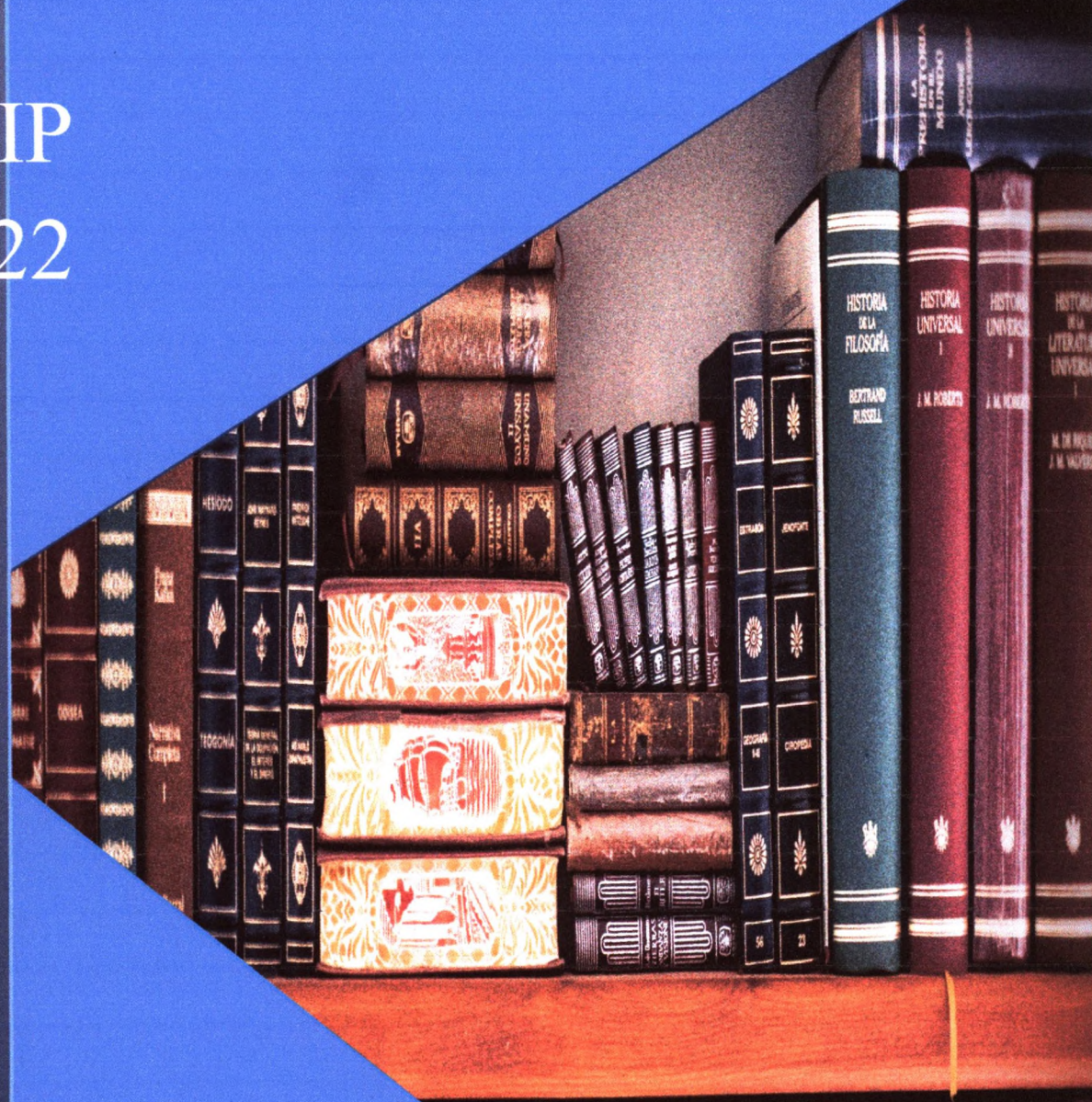


LKjIP
2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	11
1.5 Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja	26
3.3 Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1	
Kesimpulan	45
4.2	
Rekomendasi.....	46
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan BPPKAD Kab. Rembang.....	8
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang.....	14
Tabel 2.2.	Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang 2021-2026.....	15
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2022.....	16
Tabel 2.4.	Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun Anggaran 2022.....	17
Tabel 3.1.	Skala Penilaian Realisasi Kinerja.....	25
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2022....	26
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.....	27
Tabel 3.4.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022 Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.....	27
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.....	28
Tabel 3.6.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.....	28
Tabel 3.7.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.....	29
Tabel 3.8.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.....	29
Tabel 3.9.	Perhitungan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	30
Tabel 4.0.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
Tabel 4.1.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022 Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
Tabel 4.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31

Tabel 4.3.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	31
Tabel 4.4.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	32
Tabel 4.5.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	32
Tabel 4.6.	Perhitungan Indeks Pengelolaan BMD.....	34
Tabel 4.7.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	34
Tabel 4.8.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022 Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	34
Tabel 4.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	35
Tabel 5.0.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah...	35
Tabel 5.1.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah....	35
Tabel 5.2.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	36
Tabel 5.3.	Perhitungan Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.....	36
Tabel 5.4.	Target dan Realisasi Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 5.5.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022 Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	37
Tabel 5.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 5.7.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	37
Tabel 5.8.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	38
Tabel 5.9.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Tujuan 2 Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	38
Tabel 6.0.	Perhitungan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.....	39
Tabel 6.1.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 3. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	39

Tabel 6.2.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022 Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	39
Tabel 6.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel 6.4.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel 6.5.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel 6.6.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel 6.7.	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BPPKAD tahun 2022.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1..... Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	5
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/0031/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022- 2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, 31 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



PERY SUMARDI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710225 199803 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kab./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Eksistensi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung kemampuan keuangan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan penataan struktur dan personil yang dilakukan dalam tahun 2022 dan sebagai penjabaran teknis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi utamanya, maka telah dilakukan penyesuaian tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik, ada tiga pilar pokok untuk menyangga terwujudnya *good governance* antara lain *clean government*, profesionalisme personal dan kestabilan masyarakat.

Untuk mengarah pada terwujudnya *good governance* dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan terhadap publik.

Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem dan pembiayaan dengan dukungan personal yang memahami akan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat, visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan, serta pendekatan pelayanan masyarakat itu diharapkan agar tumbuh adanya *feedback* (timbang balik) antara pemerintah dan masyarakat, terutama Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah agar tercipta keselarasan yang aspiratif, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan *income* daerah.

Berbagai hasil yang dicapai tahun 2021, menunjukkan indikasi keseriusan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menuju langkah - langkah pola kerja profesionalisme, efektif dan efisien sesuai yang diharapkan pemerintah dimasa mendatang agar lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yaitu : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati selain sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- b) pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- e) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f) pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5

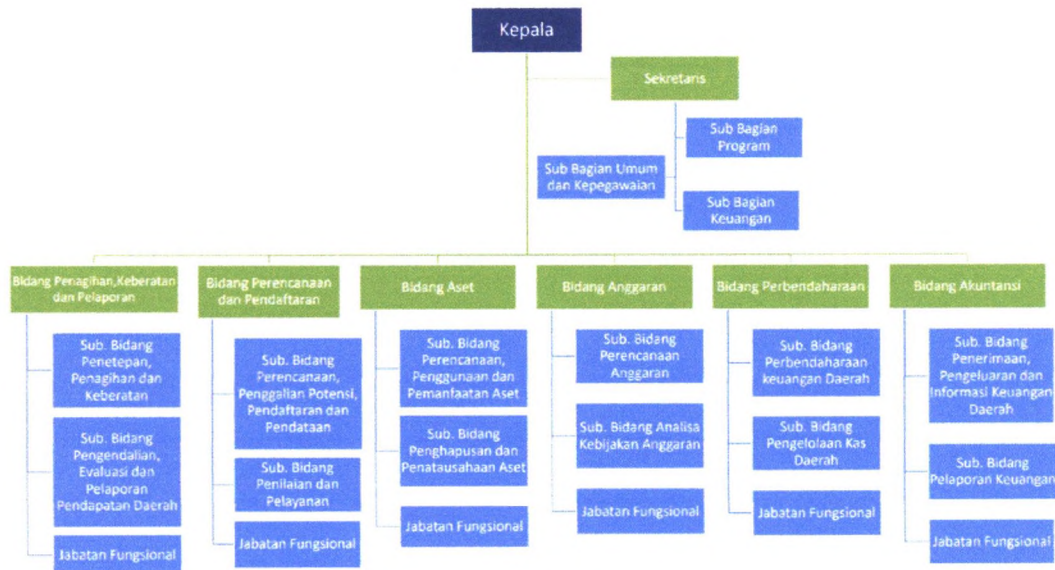
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 Orang Sekretaris, 6 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Sub Bidang, Pelaksana Teknis Badan serta kelompok jabatan fungsional.

Susunan Struktur Organisasi terdiri dari :

- a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b) Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Perencanaan dan Pendaftaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggalian Potensi, Pendaftaran, dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Pelayanan :
- d) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- e) Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
- f) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah;
- g) Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi, Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
- e) Bidang Aset terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset ;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI & PERMASALAHAN UTAMA

Berpijak pada nilai strategis keberadaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas, maka peran dalam mendukung Pendapatan, penyediaan keuangan dan aset daerah cukup memiliki arti yang sangat penting dalam struktur pemerintahan di daerah.

Sumber-sumber daya dukung organisasi, tidak akan lepas dari tingkat keberhasilan organisasi, baik dari sisi perangkat hidup, perangkat keras dan perangkat lunaknya.

A. Kondisi dan Potensi

1) Internal

Keberhasilan organisasi perangkat daerah tidak lepas dari dukungan personil aparat maupun kualitas SDM yang diselaraskan dengan beban kerja yang diembannya.

Jumlah personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 sebanyak 151 orang terdiri dari:

a) Pegawai menurut status

1. PNS : 83 orang
2. CPNS : 2 orang
3. Kontrak : 5 orang
4. Harian Lepas : 58 orang

b) Jenis Kelamin

1. Pria : 113 orang
2. Wanita : 35 orang

c) Pendidikan Formal

1. S3 : 1 orang
2. S2 : 12 orang
3. S1 : 57 orang
4. D4 : 1 orang
5. D3 : 6 orang
6. SMA/SMK: 67 orang
7. SMP : 3 orang
8. SD : 1 orang

d) Golongan Pangkat

1. Gol IV : 8 orang
2. Gol III : 56 orang
3. Gol II : 21 orang
4. Gol I : 0 orang
5. Non Gol./ Kontrak : 63 orang

e) Jabatan

1. Struktural
 - i. Eselon II : 1 orang
 - ii. Eselon III : 7 orang
 - iii. Eselon IV : 15 orang
2. Non struktural: 125 orang

f) Kualifikasi pekerjaan

1. Administrasi : 143 orang
2. Teknis : 5 orang

2) Eksternal

Optimalisasi peningkatan PAD selain di dukung langkah - langkah yang inovatif dengan melalui kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga, juga adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.

Dalam Tahun 2022, jumlah Wajib Pajak di daerah Kabupaten Rembang yang tercatat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdiri dari :

- Wajib Pajak Hotel	=	25	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Restoran	=	3.439	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Sarang Burung	=	57	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Reklame	=	776	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Hiburan	=	87	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Bahan Galian gol C	=	501	Wajib Pajak
- Wajib Pajak BPHTB	=	3.375	Wajib Pajak
- Wajib Pajak PBB	=	407.232	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Parkir	=	108	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Air Tanah	=	136	Wajib Pajak
- Wajib Pajak PPJU	=	1	Wajib Pajak

Sedangkan Wajib Retribusi (WR) yang menjadi kewenangan BPPKAD Kabupaten Rembang terdiri dari :

- Sewa Tanah	=	38	Wajib Retribusi
- Rumah Badan	=	54	Wajib Retribusi

Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka alat bukti pemungutan Retribusi Daerah dapat digunakan bentuk dokumen lain yang sah seperti karcis, nota dan sejenisnya.

3) Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1.
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
BPPKAD Kab. Rembang

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
	A. Alat-alat Besar	1	182,745,000.00
1	- Portable Generating Set	1	182,745,000.00
	B. Alat-alat Angkutan	83	3,233,082,682.00
1	- Station Wagon	9	2,073,084,863.00
2	- Sepeda Motor	74	1,159,997,819.00
	C. Alat Bengkel dan Alat Ukur	13	1,055,539,900.00
1	- Mesin Bor	1	2,500,000.00
2	- Mesin Pelubang	1	9,850,000.00
3	- Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud	2	1,000,000.00
4	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	9	1,042,189,900.00
	D. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,131	4,736,161,810.50
1	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2,000,000.00
2	- Mesin Ketik Listrik Portable	3	9,100,000.00
3	- Mesin Hitung Listrik	2	2,750,000.00
4	- Mesin Penghitung Uang	3	43,200,000.00
5	- Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	23,910,000.00
6	- Lemari Besi	9	30,197,500.00
7	- Rak Kayu	33	99,218,600.00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI
1	2	3	4
8	- Filling Besi/Metal	23	56,521,000.00
9	- Band Kas	1	31,500,000.00
10	- Lemari Sorok	1	4,240,000.00
11	- Lemari Kaca	7	47,240,000.00
12	- Lemari kayu	5	28,825,000.00
13	- Perkakas Kantor	2	20,627,000.00
14	- Papan Nama Instansi	1	3,233,000.00
15	- Papan Pengumuman	199	174,390,500.00
16	- Overhead Projektor	1	9,115,000.00
17	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	7,225,000.00
18	- Lemari Kayu	11	40,633,000.00
19	- Meja Kayu/Rotan	67	99,848,012.50
20	- Kursi Besi/Metal	53	29,737,600.00
21	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	60	52,224,500.00
22	- Meja Rapat	16	55,792,500.00
23	- Meja Telpon	3	2,415,000.00
24	- Kursi Rapat	118	59,884,480.00
25	- Kursi Tamu	6	33,225,000.00
26	- Kursi Putar	24	21,534,000.00
27	- Bangku Tunggu	5	8,999,925.00
28	- Kursi Lipat	15	5,250,000.00
29	- Meja Komputer	14	13,202,500.00
30	- Mesin Penghisap Debu	2	6,000,000.00
31	- AC Split	31	155,581,000.00
32	- Televisi	10	42,949,000.00
33	- Sound System	1	2,845,000.00
34	- Unit Power Supply	40	115,348,360.00
35	- Stabilisator	1	7,120,000.00
36	- Tangga Alumunium	2	5,320,000.00
37	- Dispenser	3	4,450,000.00

38	- Handy Cam	3	27,370,000.00
39	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	46,633,998.00
40	- Alat Pemadam Portable	3	3,465,000.00
41	- Mainframe	4	116,160,000.00
42	- Mini Komputer	3	2,700,000.00
43	- P.C Unit	40	413,732,390.00
44	- Lap Top	74	753,991,805.00
45	- Note Book	31	314,650,000.00
46	- Personal Komputer Lain-lain	9	84,475,000.00
47	- CPU	1	10,135,000.00
48	- Hard Disk	1	2,750,000.00
49	- Printer	57	367,092,480.00
50	- Scanner	1	6,250,000.00
51	- Monitor	4	13,140,000.00
52	- Printer	34	405,281,460.00
53	- Scanner	5	37,150,000.00
54	- External	2	5,800,000.00
55	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	12	72,522,000.00
56	- Server	8	468,718,700.00
57	- Peralatan Jaringan Lain-lain	10	126,802,500.00
58	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	26,260,000.00
59	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	9,862,500.00
60	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	4	27,044,000.00
61	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2,175,000.00
62	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	12,722,500.00
63	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	22,975,000.00
64	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	650,000.00
	E. Alat Studio dan Alat Komunikasi	33	260,622,498.00
1	- Camera + Attachment	1	4,400,000.00
2	- Proyektor + Attachment	7	88,508,000.00

3	- Microphone/Wireless Mic	11	69,000,000.00
4	- Power Supply Microphone	1	25,000,000.00
5	- Camera Electronic	9	61,679,498.00
6	- Lensa Kamera	1	6,835,000.00
7	- Pesawat Telephone	2	3,700,000.00
8	- Antena SHF/Parabola Portable	1	1,500,000.00
	TOTAL	1,261	9,468,151,890.50

Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan serta penerapan sistem *E-Government*, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menerapkan Sistem Aplikasi :

- a) SIMPATDA
- b) E-PBB
- c) E-BPHTB
- d) SIPD
- e) SIMDA Keuangan
- f) SIMDA Barang
- g) SIMDA GAJI

Adapun permasalahan utama dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra SKPD;
- 2) Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
- 3) Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003 berisikan dilengkapi dengan isi pelaporan LKjIP terdiri dari BAB I PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama, disusul dengan BAB II PERENCANAAN KINERJA meliputi hal-hal yang menyangkut rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Pada BAB III AKUNTABILITAS KINERJA meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Dan pada bagian PENUTUP tercermin harapan - harapan ke depan yang melatarbelakangi hasil pencapaian kinerja tahun 2022 ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, berpedoman pada tiga pilar pokok untuk menyangga terwujudnya *Good Governance* antara lain *Clean Government*, Profesionalisme Personal dan Kestabilan Masyarakat. Untuk mengarah pada terwujudnya *Good Governance* dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan terhadap publik. Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem dan pembiayaan sehingga semua personal memahami akan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat, visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan tujuan , strategi dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel. Indikator Tujuan : Opini BPK Atas LKPD.
2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Tujuan : Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD Kabupaten Rembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	90%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	70%
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,09%	17,84%
		Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,84%	3,94%

2.2. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Sedangkan berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026, terdapat 5 (lima) indikator kinerja program yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- 1)Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2)Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3)Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4)Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- 5)Persentase Peningkatan PAD

Adapun Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang merupakan proyeksi atas Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 dan Renstra BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD
Kabupaten Rembang 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	N/A	N/A	90	100
3	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	N/A	N/A	70	80
4	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	16,09%	16,09%	17,84%	21,23%
5	Persentase Peningkatan PAD	%	3,85%	3,85%	3,94%	4,06%

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam periode waktu satu tahun. Dokumen perjanjian kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPPKAD sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Bupati Rembang sebagai pihak ke-dua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan PK BPPKAD berdasarkan pada Rencana Strategis BPPKAD, Rencana Kinerja BPPKAD tahun 2022, IKU BPPKAD. Penetapan Kinerja BPPKAD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang
Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai SAKIP OPD Indeks Kepuasan Masyarakat	72,64 82
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	70
3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,84 %
		Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,94%

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2022 membutuhkan anggaran belanja langsung semula sebesar Rp. 454.495.622.412,- setelah Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 450.190.801.406,- Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BPPKAD untuk melaksanakan program pokok/utama yang berjumlah 4 program utama dan 13 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pokok/utama beserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan BPPKAD
Tahun Anggaran 2022

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	72,64	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %	23.470.832.406,00
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95,0%	
		Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,0 %	
		Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	95%	
		Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi Baik	95%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %	67.785.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 dokumen	29.515.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	9.575.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	3.870.000,00
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	24.825.000,00
1.2	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	19.734.154.148,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	19.192.184.148,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	518.270.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	11.850.000,00
	4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	11.850.000,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memahami Peraturan Perundang-Undangan	95,0 %	66.420.000,00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	51.420.000,00
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang	15.000.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	95,0 %	457.749.000,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	9.000.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	48.916.000,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	14.762.000,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	64.306.000,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	193.915.000,00
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	9.000.000,00
	7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	49.850.000,00
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	68.000.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,0%	935.757.000,00
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	767.232.000,00
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	148.675.000,00
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	19.850.000,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	95,0 %	1.580.531.011,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 laporan	285.500.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
		Disediakan		
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.659.933.258,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi Baik	95,0 %	260.534.000,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	92	136.594.000,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	21.640.000,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	43.000.000,00
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	59.300.000,00
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	95% 100,0 % 90% 100,0 %	421.620.989.000,00
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100,0 % 100%	1.985.000.000,00
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 dokumen	335.000.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	168.000.000,00
	3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 dokumen	133.000.000,00
	4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 dokumen	79.000.000,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	165.000.000,00
	6. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	220.000.000,00
	7. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Regulasi	1 dokumen	85.000.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	serta Kebijakan Bidang Anggaran		
	8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40 dokumen	130.000.000,00
	9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	40 dokumen	408.000.000,00
	10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 dokumen	172.000.000,00
	11. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	40 orang	90.000.000,00
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	100% 100%	1.469.344.000,00
	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	285.600.000,00
	2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	273.000.000,00
	3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	40 dokumen	103.000.000,00
	4. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	90 Laporan	481.000.000,00
	5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	244.000.000
	6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	82.744.000
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100% 100%	748.070.000,00
	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	40 Laporan	35.000.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
		Pengeluaran Kas Daerah		
	2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	20.000.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	4.000.000,00
	4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	257.000.000,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	65.150.000,00
	6. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.000.000,00
	7. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	29.900.000,00
	8. Pembinaan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	286.570.000,00
	9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina	18 BLUD	5.000.000,00
	10. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	34.450.000,00
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurnya Bankeu, Belanja Tidak terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	90%	417.418.575.000,00
	1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	500.000.000,00
	2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	719 Laporan	403.319.026.000,00
	3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50 Laporan	3.208.320.000,00
	4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	362 Laporan	10.391.229.000,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	70%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan	100,0 % 100,0%	1.063.980.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	90%	1.063.980.000,00
		Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	95% 3 Dokumen	
	1. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	130.000.000,00
	2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	70.000.000,00
	3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	40 Laporan	150.000.000,00
	4. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	40 Laporan	292.230.000,00
	4. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	40 Laporan	90.000.000,00
	5. Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Laporan	73.500.000,00
	6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	160.000.000,00
	7. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	98.250.000,00
	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,84%	
	MENINGKATNYA PENERIMAAN PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	3,94%	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5%	4.035.000.000,00
		Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	100%	
		Persentase Realisasi Penerimaan PAD	90%	
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah	5%	4.035.000.000,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	5%	
	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100 Dokumen	470.000.000,00
	2. Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	538.950.000,00
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	490.000.000,00
	4. Pendataan dan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil	100 Laporan	254.500.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	Objek Pajak daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
5.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100 Laporan	86.300.000,00
6.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14 Objek Pajak	248.000.000,00
7.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100 Dokumen	312.000.000,00
8.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1000 Dokumen	470.000.000,00
9.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	1.165.250.000,00
	JUMLAH			450.190.801.406,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah perwujudan kewajiban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisa dan evaluasi akuntabilitas kinerja, realisasi anggaran, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala. Adapun pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala penilaian realisasi kinerja pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 100	Sangat Baik
2	85- 100%	Baik
3	65- 84,99%	Cukup
4	50- 64,99%	Kurang
5	≤ 50 %	Sangat Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2022 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang
Tahun Anggaran 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022		Capaian			Renstra	
			Target	Realisasi	2022	2021	2020	Target Akhir 2026	Capaian (%) s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama dalam Renstra BPPKAD 2021-2026)	Nilai SAKIP OPD	72,64	69	99%	84,55%	101,05%	86	85,18%
		Nilai IKM PD	82	81	96%	100%	100,16%	82,64	98,01%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	93,76%	104,18%	N/A	85%	100%	90%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	70%	95,83%	136,9%	N/A	N/A	80%	87,5%
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,84%	19,17%	107,45%	133%	106,69%	21,23%	90,29%
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	3,94%	-0,12%	-0,03%	624,15%	44,77%	4,06%	-0,02%
Rata - Rata					89,7%	285,71%	84,11%		

Dari hasil pengukuran capaian pada tahun anggaran 2022 atas 5 (lima) indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja menunjukkan katagori Baik dengan persentase capaian diatas 85%, serta 1 indikator menunjukkan angka < 50% yaitu sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2022 sebesar 89,7% dibandingkan rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2021 sebesar 258,71%.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A.1. Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel

1) Indikator Tujuan/ Sasaran 1. Opini BPK atas LKPD

Ketercapaian Indikator Tujuan/Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel” yaitu “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Pada tanggal 27 Mei 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah secara akuntabel meskipun masih ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah telah memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sehingga dapat dinilai Capaian atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Tujuan 1. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah yang Akuntabel

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Baik	Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 nomor 191/S/XVIII.SMG/05/2022

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2020 sd 2022 untuk capaian tujuan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah yang Akuntabel

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 1 tersebut diatas pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	<p>BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar pembayaran iuran dan bantuan iuran jaminan Kesehatan BPJS belum sepenuhnya diperbarui, sehingga terdapat pembayaran atas peserta yang tidak memenuhi kriteria dalam Perjanjian Kerjasama. - Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 49.680.000,- dan denda keterlambatan pada pekerjaan penataan Gedung Mall Pelayanan 	<p>Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang antara lain agar memerintahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dalam memvalidasi dan memutakhirkan data kepesertaan program JKN bagi penduduk PBPU dan BP serta penyelesaian atas kesalahan perhitungan pembayaran peserta yang tidak memenuhi kriteria minimal sebesar Rp. 282.060.000,- sesuai dengan perjanjian kerjasama berdasarkan data hasil validasi dan; - Kepala DPKP menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan penataan Gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Rembang untuk

						Publik Kabupaten Rembang minimal sebesar Rp. 380.850.000,- yang belum dikenakan kepada Penyedia Jasa.	mempertanggung jawabkan denda keterlambatan minimal sebesar Rp. 380.850.000,- sesuai ketentuan perundang-undangan.
--	--	--	--	--	--	---	--

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.

**Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	100	748.070.000,00	700.393.250,00	93,63%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8.

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan Tepat Waktu Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggung jawaban APBD	95% 100% 100%	Menunjang Menunjang Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan

Barang Milik Daerah yang Akuntabel pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target.

A.2. Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran 1. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ” mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel” yaitu “ Opini BPK Atas LKPD”. Sasaran 1. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ” pada tahun 2022 terdiri dari satu indikator yaitu “Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” yang diukur dengan menghitung (1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%.

Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dihitung dengan perincian sebagai berikut =

Tabel 3.9.

Perhitungan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Perhitungan	Penjelasan	Jumlah	Total	Sumber data
1	1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Perda No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2022 ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 19 Oktober 2022, ini berarti tepat waktu, karena ditetapkan sebelum 31 Oktober 2022. Perda No 11 Tahun 2022 tentang APBD 2023 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022, ini berarti tepat waktu karena ditetapkan sebelum 31 Desember 2022.	100%	$\frac{100\% + 86,29\% + 95\%}{3} = 93,76\%$	Perda No 2 Tahun 2022 dan Perda No 11 Tahun 2022
2	1/3 Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = $\frac{\text{Realisasi belanja daerah 2022}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\% = \frac{1.925.950.310.758,71}{2.232.003.097.935} \times 100\% = 86,29\%$	86,28%		LRA Unaudited 2022
3	1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kualitas baik	38 OPD dari total 40 OPD = 95%	95%		LRA Unaudited 2022

Penjelasan diatas menerangkan bahwa dinilai Capaian atas Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 93,76%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Sasaran 1. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Tabel 4.0.
Target dan Realisasi
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	93,76%	104,18%	Baik	Perda No 2 Tahun 2022 dan Perda No 11 Tahun 2022, LRA 2022 Unaudited

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2020 sd 2022 untuk capaian tujuan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	85%	85%	100	N/A	N/A	N/A	90%	93,76%	104,18%

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 1 tersebut diatas pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	104,18%	90%	100%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas	Persentase Kualitas	90%	104,18%	100	- Penetapan Perda APBD dan	- BPPKAD selaku PPKD berkoordinasi dengan

Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah					<p>Perubahan APBD didasarkan pada antara lain komitmen OPD lain dan proses pembahasan di DPRD yang memakan waktu lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam serapan belanja daerah, ada 2 OPD yang belum terserap maksimal belanja daerahnya, dikarenakan faktor - faktor internal eksternal selama kurun waktu 2022. - Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami kendala khususnya pada 2 OPD, yang mengakibatkan tidak sesuai tepat waktu. 	<p>OPD lain dan DPRD dalam rangka menetapkan Perda APBD dan Perubahan APBD agar tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Serapan Belanja OPD setiap triwulan. - Melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD.
-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	---

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4..

Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	93,76%	104,18%	420.872.919.000,00	419.302.460.051,00	99,65%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 4.5.

Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	104,18%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100%	Menunjang
					Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang telah ditetapkan	86,28%	Menunjang
					Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara KUA-	90%	Menunjang

				Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PPAS, RAPBD dan APBD Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindak lanjuti	100%	Menunjang
					Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	86,29%	Menunjang
					Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	100%	Menunjang
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Banku, BTT dan Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan	100%	Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target.

A.2. Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel

2. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran 2. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ” mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel” yaitu “ Opini BPK Atas LKPD”. Sasaran 2. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ” pada tahun 2022 terdiri dari satu indikator yaitu “Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” yang diukur dengan menghitung $(1/3 \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD}) \times 100\%$

Persentase Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dihitung dengan perincian sebagai berikut =

Tabel 4.6.
Perhitungan Indeks Pengelolaan BMD

No	Perhitungan	Penjelasan	Jumlah	Total	Sumber data
1	1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD	Kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap rencana pengelolaan BMD = 100%	100	$=\frac{(100+92+95)}{3}$ =95,83	Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2022
2	1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD	Ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD = 37 OPD dari total 40 OPD= 92%	92		Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2022
3	1/3 Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD	Keterlambatan pengajuan perpanjangan tertib administrasi pemindahtanganan BMD= 24 dari 25 dokumen pemindahtanganan BMD= 95%	95		Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2022

Penjelasan diatas menerangkan bahwa nilai Capaian atas Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar 95,83%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Sasaran 2. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 4.7.
Target dan Realisasi
Capaian Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	70	95,83	136,90%	Baik	Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2022

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2020 sd 2022 untuk capaian sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022
Capaian Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	95,83	136,90%

Dikarenakan Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah baru ada di Renstra BPPKAD 2021- 2026, maka untuk perhitungan tahun 2020 dan tahun 2021 belum ada capaian, target dan realisasinya.

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 tersebut diatas pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Target Akhir Renstra 2021-2026
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	95,83	70	136,90%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.0.
Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	70	95,83	136,90%	<ul style="list-style-type: none"> - Keabaiian wajib retribusi dalam proses administrasi pemanfaatan barang milik daerah. - Pergantian personil pengurus barang pada masing-masing OPD. - Kekurangcakapan personal pada OPD yang ditunjuk sebagai pengurus barang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan surat konfirmasi atas pemanfaatan barang milik daerah yang akan habis 4 (empat) bulan sebelumnya. - Melakukan koordinasi secara intensif atas pengurus barang pada OPD, khususnya yang sering ada pergantian personal pengurus barang. - Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pada pengurus barang OPD.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	70	95,83	136,90%	1.063.980.000,00	1.026.372.725,00	96,47%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 5.2.

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	136,90%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	100% 95,83% 100% 100%	Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target.

B. Tujuan 2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

1) Indikator Tujuan: Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Tujuan 2 “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah” yaitu “Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%.

Proporsi dihitung dengan perincian sebagai berikut =

**Tabel 5.3.
Perhitungan Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah**

No	Perhitungan	Penjelasan	Hasil	Sumber data
1	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\% = \frac{353.027.073.707,53}{6.431.677,53} \times 100\% = 19,17$	Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2022= 353.027.073.707,53 Pendapatan Daerah per 31 Desember 2022 =1.841.416.431.677,53	19,17%	LRA Unaudited per 31 Desember 2022

Penjelasan diatas menerangkan bahwa nilai Capaian atas Indikator Tujuan 2 adalah sebesar 19,17%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Tujuan 2. “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah” sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.4.
Target dan Realisasi
Capaian Tujuan 2: Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	17,84 %	19,17%	107,47%	Baik	LRA Unaudited per 31 Desember 2022

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2020 sd 2022 untuk capaian tujuan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022
Capaian Tujuan 2: Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	15,97 %	17,04%	106,69%	16,09 %	21,40%	133%	17,84%	19,17%	107,47%

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 2 tersebut diatas pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026
Capaian Tujuan 2: Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	19,17%	17,84%	107,47%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7.
Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Tujuan 2: Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	17,84%	19,17%	107,47%	- Pelaksanaan inovasi dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah	- Bekerjasama dengan vendor dalam melakukan pencatatan alat rekam transaksi elektronik (tapping box) pada Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Rembang.

						<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi - Melakukan pembaharuan data khususnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan sistem E-BPHTB dan E-PBB. - Melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjahmada terkait penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan
--	--	--	--	--	--	---	---

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8.

Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	17,84%	19,17%	107,47%	2.033.550.000,00	1.855.796.759,00	91,25%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 5.9.

Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	107,47%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%	Menunjang
					Persentase harmonisasi perencanaan pendapatan transfer	100%	Menunjang
				Kegiatan: Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	100%	Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target.

B.Tujuan 2.Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

1) Sasaran 3: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran 3“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” yaitu mendukung tujuan 2 “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah”, dengan indikator yaitu Persentase

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022- Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021) dibagi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 kemudian dikali 100%.

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan perincian sebagai berikut =

Tabel 6.0.
Perhitungan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

No	Perhitungan	Penjelasan	Hasil	Sumber data
1	$(\text{Pendapatan Asli Daerah 2022} - \text{Pendapatan Asli Daerah 2021}) / \text{Pendapatan Asli Daerah 2021} \times 100\% = (353.027.073.707,53 - 404.100.646.579,46) / 404.100.646.579,46 \times 100\% = - 0,12\%$	Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 per 31 Desember 2022= 353.027.073.707,53 Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 = 404.100.646.579,46	- 0,12 %	LRA Unaudited per 31 Desember 2022

Penjelasan diatas menerangkan bahwa nilai Capaian atas Sasaran 1 adalah sebesar - 0,12%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Sasaran 1. “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 6.1.
Target dan Realisasi
Capaian Sasaran 3: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,94%	- 0,12%	- 0,03%	Sangat kurang	LRA Unaudited per 31 Desember 2022

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2020 sd 2022 untuk capaian tujuan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sd 2022
Capaian Sasaran 3: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,84%	1,72%	44,77%	3,85%	24,03%	624,15	3,94%	- 0,12%	- 0,03%

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 2 tersebut diatas pada tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Target Akhir Renstra 2021-2026
Capaian Sasaran 3: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- 0,12%	3,94%	-0,03%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4.

**Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Sasaran 3: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,94%	-0,12%	-0,03%	<ul style="list-style-type: none"> - Pandemi COVID 19 dan juga perang Rusia- Ukraina mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut menurun - Masih adanya piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan stimulus/ hadiah kepada wajib pajak yang tercapat dalam rangka pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan - Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Rembang dalam hal menyelesaikan masalah piutang pajak daerah yang belum terselesaikan.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5.

**Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 3. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	3,94%	-0,12%	-0,03%	2.001.450.000,00	1.846.668.602,00	92,26%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 6.6.

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 3. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-0,03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	50%	Menunjang
				Kegiatan:	Persentase	100%	Menunjang

				Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 belum mencapai batas maksimal dalam pemenuhan target.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, pada tahun anggaran 2022 BPPKAD Kabupaten Rembang melaksanakan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 6.7.

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BPPKAD tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.470.832.406,00	19.733.679.918,00	84,08%
	1 .Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.785.000,00	64.165.300,00	94,66%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.515.000,00	29.515.200,00	98,98%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.575.000,00	9.315.500,00	97,29
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.870.000,00	3.762.000,00	97,21%
	d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.825.000,00	21.872.600	88,11%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.734.154.148,00	16.090.340.196,00	81,54%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.192.184.148,00	15.565.019.806,00	81,10%
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	518.270.000,00	501.820.000,00	96,83%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.850.000,00	11.716.890,00	98,88%
	d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.850.000,00	11.783.500,00	99,44%
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.420.000,00	65.512.100,00	98,63%
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.420.000,00	50.814.300,00	98,82%
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	14.697.800,00	97,99%
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.749.000,00	455.098.860,00	99,42%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	8.993.500,00	99,93%

	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.916.000,00	48.382.710,00	98,91%
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.762.000,00	14.724.350,00	99,74%
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.306.000,00	64.263.700,00	99,93%
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	193.915.000,00	193.122.600,00	99,59%
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000,00	7.990.000,00	87,67%
	g. Penyediaan Bahan/Material	49.850.000,00	49.848.500,00	100,00%
	h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.000.000,00	67.873.500,00	99,81%
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	935.757.000,00	923.679.000,00	98,71%
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	767.232.000,00	759.749.000,00	99,02%
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.675.000,00	144.080.000,00	96,91%
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.850.000,00	19.850.000,00	100,00%
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.948.433.258,00	1.874.837.262,00	96,22%
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.077.000,00	69,23%
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.500.000,00	247.215.728,00	86,59%
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.659.933.258,00	1.625.544.534,00	97,93%
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.534.000,00	260.043.200,00	99,81%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	136.594.000,00	136.254.000,00	99,75%
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.640.000,00	21.625.000,00	99,93%
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.000.000,00	42.997.000,00	99,99%
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.300.000,00	59.167.200,00	99,78%
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	421.620.989.000,00	420.002.853.301,00	99,62%
	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.985.000.000,00	1.890.501.229,00	95,24%
	a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	335.000.000,00	320.395.154,00	95,64%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	168.000.000,00	162.287.050,00	96,60%
	c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	133.000.000,00	132.664.850,00	99,75%
	d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	79.000.000,00	78.951.650,00	99,94%
	e. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	165.000.000,00	159.773.850,00	96,83%
	f. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	220.000.000,00	215.670.900,00	98,03%
	g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	85.000.000,00	84.141.000,00	98,99%
	h. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	130.000.000,00	121.064.900,00	93,13%
	i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	408.000.000,00	364.090.250,00	89,24%
	j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	172.000.000,00	171.664.400,00	99,80%

	k. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	79.797.225,00	88,66%
	2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.469.344.000,00	1.384.613.008,00	94,23%
	a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	285.600.000,00	269.382.080,00	94,32%
	b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	273.000.000,00	264.293.666,00	96,81%
	c. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	103.000.000,00	78.218.900,00	75,94%
	d. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	481.000.000,00	455.749.312,00	94,75%
	e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	244.000.000,00	234.814.050,00	96,24%
	f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82.744.000,00	82.155.000,00	99,29%
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	748.070.000,00	700.393.250,00	93,63%
	a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	35.000.000,00	29.480.650,00	84,23%
	b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	20.000.000,00	19.385.000,00	96,93%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4.000.000,00	2.148.250,00	53,71%
	d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	257.000.000,00	252.106.750,00	98,10%
	e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	65.150.000,00	57.716.000,00	88,59%
	f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	11.000.000,00	10.469.600,00	95,18%
	g. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	29.900.000,00	26.240.000,00	87,76%
	h. Pembinaan Akuntansi, pelaporan, Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	286.570.000,00	264.568.600,00	92,32%
	i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	5.000.000,00	4.479.000,00	89,58%
	j. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	34.450.000,00	33.799.400,00	98,11%
	4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	417.418.575.000,00	416.027.345.814,00	99,67%
	a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	500.000.000	250.990.814,00	50,20%

	Pinjaman Pemerintah Daerah			
	b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	403.319.026.000,00	403.062.026.000,00	99,94%
	c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.208.320.000	2.323.100.000,00	72,41%
	d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	10.391.229.000	10.391.229.000	100,00%
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.063.980.000,00	1.062.372.725,00	96,47%
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.063.980.000,00	1.062.372.725,00	96,47%
	a. Penyusunan Standar Harga	130.000.000,00	126.934.350,00	97,64%
	b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	69.423.475,00	99,18%
	c. Penatausahaan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	145.434.900,00	96,96%
	d. Pengamanan Barang Milik Daerah	292.230.000,00	290.636.300,00	99,45%
	e. Penilaian Barang Milik Daerah	90.000.000,00	85.388.450,00	94,88%
	f. Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	73.500.000,00	67.621.000,00	92,00%
	g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	160.000.000,00	145.705.250,00	91,07%
	h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	98.250.000,00	95.229.000,00	96,93%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.035.000.000,00	3.702.464.961,00	91,76%
	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.035.000.000,00	3.702.464.961,00	91,76%
	a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	470.000.000,00	432.698.805,00	92,06%
	b. Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	538.950.000,00	510.888.600,00	94,79%
	c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	490.000.000,00	475.553.000,00	97,05%
	d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	254.500.000,00	209.708.297,00	82,40%
	e. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	86.300.000,00	67.221.150,00	77,89%
	f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 44a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	248.000.000,00	217.819.900,00	87,83%
	g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	312.000.000,00	270.359.800,00	86,65%
	h. Penagihan Pajak Daerah	470.000.000,00	436.172.667	92,80%
	i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.165.250.000,00	1.082.042.742,00	92,86%
	JUMLAH	450.190.801.406	444.465.366.905	98,73%

Dari total anggaran senilai Rp. 450.190.801.406,00, yang terealisasi sejumlah Rp. 444.465.366.905,00, sehingga capaian sebesar 98,73%, ini berarti capaian anggaran BPPKAD selama kurun waktu 2022 terhitung baik.

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun. Dalam Renstra tahun 2021- 2026, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menetapkan 2 Tujuan dan 5 sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk mencapai sasaran, maka ditetapkan kebijakan dan program - program dijabarkan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap - tiap tahun bertahap. Tiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan evaluasi hasil kinerja untuk mengetahui keberhasilan program dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan analisa atas realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan karena rata-rata indikator kinerjanya lebih dari 89,7% dan masuk pada kategori baik. Keberhasilan ini bukan suatu hal yang mudah diperoleh, karena dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak dijumpai hambatan yang cukup serius, antara lain efek pandemic dan krisis Ukraina Rusia, serta ketidakdisiplinan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan maupun asset milik daerah.

Sehubungan dengan pencapaian kinerja 89,7%, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang berusaha untuk meningkatkan kinerjanya lebih maksimal lagi agar kedepan capaian kinerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya dan agar dapat mempertahankan pada kategori sangat tinggi atau diatas 90%. Strategi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak/retribusi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan sumber daya aparat daerah. Koordinasi antar Badan/instansi mengenai aset / barang milik daerah. Sedangkan strategi yang terkait dengan program / kegiatan, pada tahun 2022 lebih diprioritaskan pada program / kegiatan yang indikator capaian kinerjanya ditahun sebelumnya masih rendah.

1.2 REKOMENDASI

Hambatan - hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 perlu segera diselesaikan agar dampaknya dapat diminimalisir dan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 untuk lebih meningkatkan capaian kinerja. Kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 diantisipasi sejak dini demi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan mutu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang merencanakan pemecahan secara sistematis dan bertahap baik mengenai pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya aparat dan administrasi aset daerah. Dengan perencanaan dan pemecahan yang sistematis, diharapkan pada tahun 2023 realisasi capaian kinerja dapat ditingkatkan.

Rembang, 31 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19710225 199803 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 27 Mei 2022

Nomor	: 191/S/XVIII.SMG/05/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu Berkas	Bupati Rembang
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	Di Rembang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, antara lain:

- a. Dasar pembayaran iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan BPJS belum sepenuhnya diperbarui, sehingga terdapat pembayaran atas peserta yang tidak memenuhi kriteria dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
- b. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp49,68 juta dan denda keterlambatan pada pekerjaan Penataan Gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Rembang minimal sebesar Rp380,85 juta yang belum dikenakan kepada Penyedia Jasa.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dalam memvalidasi dan memutakhirkan data kepesertaan Program JKN bagi penduduk PBP dan BP, serta penyelesaian atas kesalahan perhitungan pembayaran peserta yang tidak memenuhi kriteria minimal sebesar Rp282,06 juta sesuai dengan perjanjian kerjasama berdasarkan data hasil validasi; dan
- b. Kepala DPKP menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen atas Pekerjaan Penataan Gedung Mall Pelayanan Publik untuk mempertanggungjawabkan denda keterlambatan minimal sebesar Rp380,85 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 66A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 66B/LHP/XVIII.SMG/05/2022, masing-masing bertanggal 20 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Diandatangani secara elektronik
Ayub Anas

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY SUMARDI, SE, MM.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

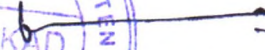
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2022

PIHAK KEDUA

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA

FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah Sasaran Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD IKM OPD	70% 82,75%
2.	Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	17,84% 3,94%
3.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel Sasaran a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah b. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	WTP 100% 100%

Program :

Anggaran :

Keterangan :

- | | | |
|---|--------------------|------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 26.325.623.412 | APBD |
| 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp 422.984.999.000 | APBD |
| 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp 1.000.000.000 | APBD |
| 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp 4.185.000.000 | APBD |

Rembang, ²⁶ Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax : (0295) 693124 REMBANG 59211

Email : bppkad@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR SUSILOWATI, SE
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FERY SUMARDI, SE, MM.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

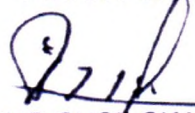
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 27 Januari 2022

PIHAK KEDUA

FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

PIHAK PERTAMA

NUR SUSILOWATI, SE.
Pembina Tk. I
NIP. 19641128 199402 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	70 %
		IKM OPD	82,75 %
		Meningkatnya Pengelolaan Data Kepegawaian yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	95%
		Meningkatnya Pelayanan Umum	95%
		Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95 %
		Melaksanakan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
		Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Kesekretariatan	Rp.477.774.419.566	APBD
Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 454.495.622.412	APBD
2 Program Administrasi Keuangan	Rp 22.774.747.154	APBD
3 Program Pengelolaan Kepegawaian	Rp 91.800.000	APBD
4 Program Pengelolaan Umum	Rp. 412.250.000	APBD

Rembang, 27 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

Sekretaris Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

NUR SUSIOWATI, SE.
Pembina Tingkat. I
NIP. 19641128 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ROMLI
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan pada BPPKAD Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE. MM.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Rembang, 27 Januari 2022

Pihak Kedua



FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740225 199803 1 004

Pihak Pertama



Drs. ROMLI
Pembina
NIP. 19640608 198508 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	% realisasi PAD	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.325 500.000	APBD

Rembang, 27 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

Kepala Bidang Penagihan,
Keberatan dan Pelaporan
BPPKAD Kabupaten Rembang

Drs. ROMLI
Pembina
NIP. 19640608 198508 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : KUSWANDI, SH
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran pada BPPKAD
Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FERY SUMARDI SE MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 27 Januari 2022

Pihak Kedua

FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

Pihak Pertama

KUSWANDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19670903 199401 1 001

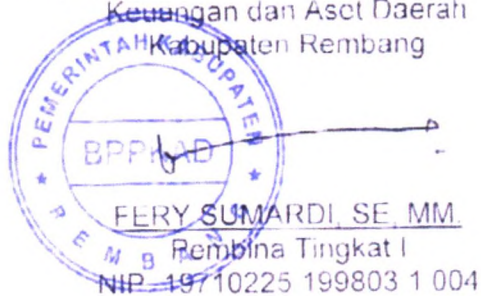
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2.5%
		Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp1.859.500 000	APBD

Rembang, 27 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asot Daerah
Kabupaten Rembang



Kepala Bidang Perencanaan dan
Pendaftaran BPPKAD
Kabupaten Rembang


KUSWANDI, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19670903 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRODIN, SE., MM
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., MM
Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 27 Januari 2022

Pihak Kedua



FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710225 199803 1 004

Pihak Pertama

ASRODIN, SE., MM
Penata Tk. I
NIP. 19710820 199503 1 004

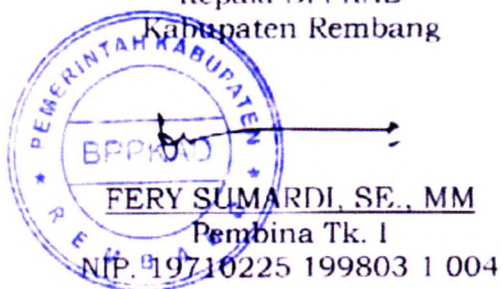
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG ASET BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah Baik/ Tertib dan Akuntabel	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.000.000.000	APBD

Rembang, 27 Januari 2022

Kepala BPPKAD
Kabupaten Rembang



Kepala Bidang Aset BPPKAD
Kabupaten Rembang

ASRODIN, SE., MM
Penata Tk. I
NIP. 19710820 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P DIPONEGORO No 90 TELP (0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMADI, SH
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 27 Januari 2022



PIHAK PERTAMA

SUMADI, SH
Penata Tk I
NIP. 19700520 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Persentase Rancangan Perda APBD yang disampaikan Tepat Waktu	Persentase Rancangan Perda APBD yang disampaikan Tepat Waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.355.000.000	APBD

Rembang, 27 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



Kepala Bidang Anggaran
BPPKAD Kabupaten Rembang

SUMADI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19700520 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURROHMAH, SE. MAP
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., MM
Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 27 Januari 2022

Pihak Kedua



FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710225 199803 1 004

Pihak Pertama

NURROHMAH, SE. MAP
Pembina
NIP. 19710802 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	95%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 899.744.000	APBD
2. Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Daerah	Rp. 420.030.255.000	APBD

Rembang, 27 Januari 2022



Kepala BPPKAD
Kabupaten Rembang

FERY SUMARDI, SE. MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710225 199803 1 004

Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Kabupaten Rembang


NURROHMAH, SE. MAP
 Pembina
 NIP. 19710802 199803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	% Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 650.000.000	APBD

Rembang, 27 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD
Kabupaten Rembang

SRI NURJANTI, SE, MM.
Pembina
NIP. 19720205 199803 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI NURJANTI, SE, MM.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE, MM.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 27 Januari 2022

PIHAK KEDUA



FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

PIHAK PERTAMA



SRI NURJANTI, SE, MM.
Pembina
NIP. 19720205 199803 2 007